

**ANALISIS LOKASI PUSAT PERTUMBUHAN SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP)
JAWA TIMUR BAGIAN BARAT (KARESIDENAN MADIUN)**

Santi Tiar Retno Ayu

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

santi.tiarra@gmail.com

Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T

Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Tahun 2014 daerah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat merupakan daerah dengan laju pertumbuhan yang rendah, terbukti dari 6 kota dan kabupaten yang ada di SWP Jawa Timur bagian barat ini terdapat 5 Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi menurut tinjauan Regional berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota tahun 2014 sebesar 5,86 persen. Hanya satu Kabupaten / Kota mengalami laju pertumbuhan melebihi rata-rata laju pertumbuhan provinsi yaitu Kota Madiun dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6,62 persen. Terdapat lima Kabupaten yang laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut harus segera ditangani, salah satu cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan wilayah adalah dengan menentukan skala prioritas pembangunan, wilayah mana yang terlebih dahulu untuk dibangun dan sektor apa yang patut dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan, interaksi antar wilayah, sektor basis apa yang patut dikembangkan dan daerah mana yang sesuai menjadi pusat pertumbuhan di SWP Jawa Timur bagian barat.

Lokasi penelitian ini adalah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur Bagian Barat yang dibagi kembali menjadi unit yang lebih kecil yaitu Sub Satuan Wilayah pengembangan (SSWP). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, teknik analisis datanya menggunakan tiga analisis yaitu, analisis skalogram dan analisis indeks sentralitas, analisis gravitasi dan analisis Location Quotient (LQ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas di setiap daerah memiliki kuantitas tidak sama, fasilitas pelayanan masih terkonsentrasi pada daerah perkotaan. Interaksi wilayah antar daerah memiliki kekuatan yang berbeda dipengaruhi jarak, jumlah penduduk dan adanya tarik daerah. Sektor basis setiap daerah dipengaruhi oleh besarnya nilai sektor berpengaruh terpusat pemasukan daerah. Berdasarkan analisis lokasi pusat pertumbuhan di Kota Madiun adalah SSWP Kartoharjo, pusat pertumbuhan di Kabupaten Madiun adalah SSWP Mejayan, pusat pertumbuhan di Kabupaten Ngawi adalah SSWP Ngawi, pusat pertumbuhan di SSWP Magetan adalah SSWP Maospati, pusat pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo adalah SSWP Ponorogo dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Pacitan adalah SSWP Pacitan.

Kata Kunci : Pusat pertumbuhan, analisis lokasi

Abstract

In 2014 the area in the western part of East Java Regional Unit Development (SWP), is the area with the growth rate is low, it is evident from the six cities and counties in the western part of East Java Regional Unit Development (SWP) there are five districts that have growth rates below average the rate of economic growth in East Java. The average rate of economic growth by the GDP according to the reviews Regional District / City in 2014 amounted to 5.86 percent. Only one district / city experienced a growth rate exceeds the average growth rate of the province is Madiun city with the economic growth rate in 2014 amounted to 6.62 percent. While there are five districts that the rate of economic growth is below of the average economic growth rate in East Java province. It must be dealt with, one way to increase the growth rate of the region is to determine development priorities, whichever comes first area to be built and what sectors that should be developed. This study aims to determine the condition of the service facilities, the interaction between regions, sectors base what should be developed and which areas are suitable to be the center of growth in the western part of East Java Regional Unit Development (SWP).

The research location is development unit area (SWP) part of East Java region, western regions subdivided into smaller units, namely Sub Regional Unit Development (SSWP). This type of research is descriptive quantitative research. Data collection technique used documentation and interview methods, data analysis techniques used three of analysis, namely, analysis schallogram and centrality index analysis, analysis of gravity and Location Quotient (LQ).

The research result is the facilities in each region have the same quantity, service facilities are still concentrated in urban areas. Regional interaction between regions have different strengths affected by distance, population and the attractiveness of the area. To the base sector of each region is affected by the value of centralized influential sectors of local revenue. Based on the analysis of the location of the center of growth in Madiun city are SSWP Kartoharjo, growth center in Madiun County are SSWP Mejayan, the center of growth in Ngawi are SSWP Ngawi, a growth center

SSWP Magetan are SSWP Maospati, growth center in Ponorogo are SSWP Ponorogo and growth center in Pacitan are SSWP Pacitan.

Keywords: *Center of growth, location analysis.*

PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi era otonomi daerah memberikan hak pada masing-masing daerah untuk mengatur pembangunan wilayahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam rangka membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang tinggi dari waktu ke waktu. Otonomi daerah dapat menimbulkan kesenjangan antar daerah dikarenakan terdapat daerah yang mampu melihat peluang dan dapat berkembang dengan cepat dan baik, sebaliknya terdapat pula daerah yang kesulitan mengembangkan daerahnya sendiri. Kesenjangan antar daerah saat ini masih menjadi masalah besar yang dihadapi negara Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antar daerah salah satu adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau minimal mempersempit gap perkembangan ekonomi antar daerah (Kuncoro, 2002:23). Pengelompokan atau pembagian wilayah dalam suatu kawasan bertujuan agar pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah serta bersama-sama saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.

Analisis pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Pusat pertumbuhan merupakan sebuah kota yang dengan sendirinya memiliki kuasa secara organisasi atas bagian-bagian yang lain dan juga atas kota-kota kecil yang terdapat disekitarnya. Pusat pertumbuhan berperan sebagai pendorong perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi ketika diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah yang baik, dan bila pusat pertumbuhan ini telah berkembang dengan baik maka akan memberikan *spread effect* pada daerah belakangnya, sehingga ekonomi di daerah belakang (*hinterland*) juga mengalami perkembangan.

Kebijakan untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung terus membesar, dan berpotensi mendorong perkembangan mega-urban tersebut, serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan, dan mengendalikan perkembangan kawasan

terbangun di perkotaan serasi dengan kawasan pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan membagi struktur ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur menjadi sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Penentuan sembilan SWP di Jawa Timur berdasarkan kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristik wilayah. Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur cenderung memusat pada titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah yang telah berkembang terlebih dahulu.

Salah satu diantara sembilan daerah SWP tersebut adalah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat yang menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat yang terdiri dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi, dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan.

Tahun 2014 daerah-daerah SWP Jawa Timur bagian barat ini merupakan daerah dengan laju pertumbuhan yang rendah, terbukti dari 6 kota dan kabupaten yang ada di SWP Jawa Timur bagian barat ini terdapat 5 Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi menurut tinjauan Regional berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota tahun 2014 sebesar 5,86 persen, hanya 1 Kabupaten / Kota mengalami laju pertumbuhan melebihi rata-rata laju pertumbuhan provinsi yaitu Kota Madiun dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6,62 persen, sedangkan terdapat 5 Kabupaten yang laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Ngawi sebesar 5, 61 persen, Kabupaten Madiun sebesar 5,34 persen, Kabupaten Ponorogo sebesar 5,28 persen, Kabupaten Pacitan sebesar 5,21 persen dan yang paling rendah adalah Kabupaten Magetan sebesar 5, 18 persen. Enam Kabupaten/Kota yang berada di SWP Jawa Timur bagian barat, lima kabupaten/kota masih mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Hal ini tentu memerlukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Usaha meningkatkan laju pertumbuhan suatu daerah dapat dilakukan dengan berbagai usaha, salah satunya adalah dengan penentuan

pusat pertumbuhan. Analisis lokasi pusat pertumbuhan ini dimaksudkan agar menemukan suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan dan mengetahui sektor apa yang dapat dikembangkan dengan baik, sehingga daerah tersebut akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan. Terbangunnya daerah yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan tadi, diharapkan memberikan efek yang positif bagi daerah belakangnya, sehingga secara bersama-sama daerah-daerah tersebut mengalami perkembangan yang signifikan.

Analisis lokasi pusat pertumbuhan di SWP Jawa Timur bagian barat dapat dilakukan dengan beberapa analisis yaitu analisis gravitasi, analisis skalogram dan indeks sentralitas, sehingga akan menemukan lokasi pusat pertumbuhan yang tepat. Langkah diharapkan tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan di masing-masing wilayah SWP Jawa Timur bagian barat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diadakan penelitian yang berjudul "Analisis Lokasi Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat (Karesidenan Madiun)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas, interaksi antar wilayah berdasarkan analisis gravitasi, sektor basis yang menjadi andalan masing-masing daerah berdasarkan analisis *location quotient (LQ)* dan mengetahui daerah yang sesuai untuk menjadi lokasi pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat (Karesidenan Madiun).

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu suatu jenis penelitian selain dipaparkan dalam bentuk-bentuk kalimat juga disajikan dengan angka-angka dari hasil analisis data. Lokasi penelitian ini adalah seluruh wilayah administrasi Satuan Pengembangan Wilayah Jawa Timur bagian barat (Karesidenan Madiun) yang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan langsung menggunakan populasi. Populasi yang digunakan adalah seluruh Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang ada di SWP Jawa Timur bagian barat. Unit analisis yang digunakan adalah SSWP masing-masing kota/kabupaten yang ada di SWP Jawa Timur bagian barat. SSWP tersebut merupakan pengelompokan kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kota/kabupaten-nya sendiri.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu

1. Jumlah fasilitas pelayanan, yang terdiri dari 5 kelompok
 - a. Fasilitas ekonomi : pasar, mall, bank, koperasi,
 - b. Fasilitas keagamaan: mushola, gereja, masjid, vihara, pura.
 - c. Fasilitas pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA, SMK, perguruan tinggi.
 - d. Fasilitas kesehatan: puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, pos pelayanan terpadu (Posyandu).
 - e. Fasilitas pendukung: hotel, kantor pos, terminal, pariwisata.
2. Jumlah Penduduk (Jiwa)
3. Interaksi antar wilayah (Km)
4. Pendapatan sektoral (Juta/tahun)

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara terstruktur. Data sekunder diperoleh dari metode dokumentasi. Data-data yang dipakai dalam metode dokumentasi bersumber dari dinas-dinas yang terkait seperti BAPPEDA tiap-tiap Kota/kabupaten dan BPS Provinsi Jawa Timur. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan pihak terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mendapatkan data primer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Analisis Skalogram

Menurut Amas Yamin, dalam (Danastri, 2011:31) metode skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan. Penentuan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan tidak cukup hanya melihat keberagaman fasilitasnya saja, tetapi juga mempertimbangkan frekuensi setiap jenis fasilitas tersebut. Tingkat frekuensi fasilitas pada suatu kecamatan mempengaruhi indeks sentralitas kecamatan tersebut.

2. Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi banyak digunakan dalam perencanaan wilayah. Model ini dapat membantu perencanaan wilayah untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi yang lain di sekitarnya. Analisis ini bergantung pada jarak antar wilayah dan jumlah penduduk. Penggunaan jumlah penduduk sebagai alat ukur bukanlah tanpa alasan, karena jumlah penduduk sangat terkait langsung dengan berbagai ukuran lain seperti banyaknya lapangan pekerjaan total pendapatan, jumlah/luas bangunan, banyaknya fasilitas kepentingan umum, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah jarak antar wilayah yang akan diukur interaksinya. Jarak

mempengaruhi keinginan orang untuk berpergian, karena untuk mememph jarak jarak diperlukan waktu, tenaga dan biaya. Semakin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, makin rendah minat orang berpergian. (Tarigan, 2005: 52)

Rumus Gravitasi secara umum adalah sebagai berikut:

$$T_{ij} = k \frac{P_i \times P_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan:

T_{ij} =Jumlah trip antara kecamatan i dan kecamatan j

P_i = Penduduk kecamatan i

P_j = penduduk kecamatan j

d_{ij} = jarak antar kecamatan i dengan kecamatan j

b = pangkat dari d_{ij} ; nilai b dapat dihitung dan apabila tidak dihitung maka sering digunakan $b= 2$

k = sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman, juga dapat dihitung seperti b

3. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Analisis *Location Quotient (LQ)* merupakan teknik analisis yang digunakan menganalisis apakah suatu sektor termasuk sektor basis atau sektor non basis. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja.(Tarigan, 200:67).

Rumus untuk mengitung LQ yaitu: (Arsyad, 2010:48)

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Keterangan :

LQ :*Location Quotient* dari sektor i

V_i :PDRB sektor i pada SSWP di Kabupaten

V_t :PDRB total di SSWP

v_i :PDRB sektor i di Kota/Kabupaten

v_t : PDRB total di Kota/Kabupaten

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dapat diartikan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Bila nilai $LQ < 1$, maka hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis, yang berarti bahwa sektor tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri, artinya sektor tersebut bukan sektor unggulan.
2. Bila nilai $LQ = 1$, hal ini menunjukkan sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri.
3. Bila nilai $LQ > 1$, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis, berarti selain sektor tersebut

mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri dan mempunyai potensi ekspor ke wilayah yang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kelengkapan Fasilitas

a. Analisis Skalogram

Analisis skalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu daerah sebagai indikator difungsikannya daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan. Tujuan digunakannya analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kota-kota yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas kota yang tersedia. Penelitian ini menggunakan 23 jenis fasilitas.

1) Kota Madiun

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram yang menghitung kuantitas dari masing-masing fasilitas, SSWP Kartoharjo memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 36,66%, sedangkan SSWP Taman dan SSWP Maguharjo dengan presentase kelengkapan fasilitas sebesar 31,67%.

2) Kabupaten Madiun

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram yang menghitung kuantitas dari masing-masing fasilitas, SSWP Mejayan memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 28,36%, SSWP Dolopo memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 26,87%, SSWP Jiwan memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 23,88% dan SSWP memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 20,90%.

3) Kabupaten Ngawi

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram yang menghitung kuantitas dari masing-masing fasilitas, SSWP Ngawi memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 28,99%, SSWP Karangjati dan SSWP Widodaren memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 23,19%, SSWP Ngrambe memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 24,64%.

4) Kabupaten Magetan

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram yang menghitung kuantitas dari masing-masing fasilitas, SSWP Maospati memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 23,91%, SSWP Plaosan memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 21,74%, SSWP Magetan memiliki presentase kelengkapan fasilitas

sebesar 17,39% , SSWP Kawedanan memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 17,39%, dan SSWP Parang memiliki presentase kelengkapan fasilitas 16,30%.

- 5) Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan perhitungan analisis skalogram yang menghiung kuantitas dari masing-masing fasilitas, SSWP Ponorogo presentase kelengkapan memiliki fasilitas sebesar 21,95%, SSWP Pulung menempati hierarki II dengan presentase kelengkapan fasilitas sebesar 20,73%, SSWP Jetis dan SSWP Jambon memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 19,51% dan SSWP Slahung memiliki presentasi kelengkapan fasilitas 18,29%.
- 6) Kabupaten Pacitan
Berdasarkan perhitungan analisis skalogram yang menghiung kuantitas dari masing-masing fasilitas, SSWP Pacitan memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 26,87%, SSWP Punung memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 25,37%, SSWP Bandar dan SSWP Ngadirojo memiliki presentase kelengkapan fasilitas sebesar 23,88%.

b. Analisis Indeks Sentralitas

Indeks sentralitas digunakan untuk melihat kemampuan pelayanan suatu pusat ditinjau jumlah unit fasilitas yang terdapat pada pusat pelayanan. Nilai keterpusatan dapat diperoleh dari jumlah total bobot masing-masing jenis fasilitas dikalikan jumlah fasilitas tersebut. Prinsip pembobotan suatu fasilitas dilakukan dengan cara membagi nilai sentralitas gabungan (100) dengan jumlah fasilitas yang terdapat di seluruh pusat pelayanan, jadi semakin besar jumlah suatu fasilitas maka bobotnya akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Tahapan dalam menghitung nilai indeks sentralitas adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Madiun
Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas SSWP Kartoharjo menempati hirarki pertama dengan nilai indeks sentralitas 846.69. SSWP Manguharjo menempati hierarki II dengan nilai indeks sentralitas 604.66. SSWP Taman menempati hirarki III dengan nilai indeks sentralitasnya 748.65.
- 2) Kabupaten Madiun
Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas SSWP Mejayan menempati hirarki pertama dengan nilai indeks sentralitas 735.37. SSWP Dolopo menempati hirarki II dengan nilai indeks

sentralitas 610.35. SSWP Jiwan menempati hierarki III dengan nilai indeks sentralitasnya 295.36. SSWP Wungu menempati hirarki IV dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 258.92.

- 3) Kabupaten Ngawi
Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas SSWP Ngawi menempati hirarki pertama dengan nilai indeks sentralitas 829.31. SSWP Widodaren menempati hierarki II dengan nilai indeks sentralitas 411.43. SSWP Ngrambe menempati hirarki III dengan nilai indeks sentralitasnya 384.62. SSWP Karangjati menempati hirarki IV dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 375.43.
- 4) Kabupaten Magetan
Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas SSWP Maospati menempati hirarki pertama dengan nilai indeks sentralitas 750.90. SSWP Magetan menempati hirarki II dengan nilai indeks sentralitas 611.66. SSWP Plaosan menempati hirarki III dengan nilai indeks sentralitasnya 424.69. SSWP Kawedanan menempati hirarki IV dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 239.96. SSWP Parang menempati hirarki IV dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 166.12
- 5) Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas SSWP Ponorogo menempati hirarki pertama dengan nilai indeks sentralitas 701.08. SSWP Jambon menempati hirarki II dengan nilai indeks sentralitas 412.59. SSWP Jetis menempati hirarki III dengan nilai indeks sentralitasnya 334.18. SSWP Pulung menempati hirarki IV dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 325.42. SSWP Slahung menempati hirarki V dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 232.98.
- 6) Kabupaten Pacitan
Berdasarkan perhitungan indeks sentralitas SSWP Pacitan menempati hirarki pertama dengan nilai indeks sentralitas 711.53. SSWP Bandar menempati hirarki II dengan nilai indeks sentralitas 412.71. SSWP Ngadirojo menempati hirarki III dengan nilai indeks sentralitasnya 397.72. SSWP Punung menempati hirarki IV dengan nilai indeks sentralitasnya sebesar 378.04.

2. Interaksi Wilayah

Interaksi antar wilayah dapat dihitung dengan analisis gravitasi. Analisis gravitasi dipengaruhi oleh

jumlah penduduk dan jarak antar wilayahnya. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin dekat jarak antar wilayahnya maka akan semakin besar interaksi antar dua wilayah tersebut. Berdasarkan perhitungan analisis gravitasi SSWP Jawa Timur bagian barat di dapat data sebagai berikut:

- a) Kota Madiun
Kekuatan interaksi antar wilayah SSWP Taman dengan SSWP Kartoharjo sebesar 235.310.288,7. SSWP Taman dan SSWP Manguharjo sebesar 102.559.024,7. SSWP Manguharjo dengan SSWP Kartoharjo sebesar 98.402.962,4.
- b) Kabupaten Madiun
Kekuatan interaksi SSWP Wungu dengan SSWP Jiwan sebesar 186.276.584, 6. SSWP Dolopo dengan SSWP Wungu sebesar 109.700.161, 5. SSWP Wungu dengan SSWP Mejayan sebesar 57.136.991, 9. SSWP Dolopo dengan SSWP Jiwan sebesar 53.851.774,1. SSWP Dolopo dengan SSWP Mejayan sebesar 41.685.210,4. SSWP Jiwan dengan SSWP Mejayan sebesar 39.107.984,7.
- c) Kabupaten Ngawi
Kekuatan interaksi SSWP Ngawi dengan SSWP Karangjati sebesar 119.809.470,3. SSWP Ngrambe dengan SSWP Widodaren sebesar 100.339.799, 3. SSWP Ngawi dengan SSWP Widodaren sebesar 79.236.742,4. SSWP Ngrambe dengan SSWP Ngawi sebesar 58.785.316,8. SSWP Karangjati dengan SSWP Widodaren sebesar 16.032.882,2. SSWP Ngrambe dengan SSWP Karangjati sebesar 11.894.709,1.
- d) Kabupaten Magetan
Kekuatan interaksi SSWP Kawedanan dengan SSWP Maospati sebesar 175.753.924,5. SSWP Magetan dengan SSWP Maospati sebesar 165.891.746,1. SSWP Plaosan dengan SSWP Magetan sebesar 135.040.261,1. SSWP Kawedanan dengan SSWP Magetan sebesar 93.823.038,6. SSWP Parang dengan SSWP Magetan sebesar 56.497.643,8. SSWP Parang dengan SSWP Plaosan sebesar 38.813.343,6. SSWP Plaosan dengan SSWP Maospati sebesar 38.044.963,1. SSWP Parang dengan SSWP Kawedanan sebesar 26.709.230,7. SSWP Kawedanan dengan SSWP Plaosan sebesar 23.428.727,1. SSWP Parang dengan SSWP Maospati sebesar 21.745.420,1.

- e) Kabupaten Ponorogo
Kekuatan interaksi SSWP Pulung dengan SSWP Ponorogo sebesar 718.232.666,3. SSWP Jetis dengan SSWP sebesar 450.550.567,6. SSWP Ponorogo dengan SSWP Jambon sebesar 57.545.902,7. SSWP Slahung dengan SSWP Jetis sebesar interaksi 53.010.438,9. SSWP Slahung dengan SSWP Ponorogo sebesar 44.485.283,7. SSWP Jetis dengan SSWP Jambon sebesar 24.023.351,5. SSWP Jetis dengan SSWP Pulung sebesar 20.564.423,2. SSWP Pulung dengan SSWP Jambon sebesar 14.569.868,3. SSWP Slahung dengan SSWP Jambon sebesar 10.986.963,4. SSWP Slahung dengan SSWP Pulung sebesar 6.218.211,1.
- f) Kabupaten Pacitan
Kekuatan interaksi SSWP Punung dengan SSWP Pacitan sebesar 21.407.181,8. SSWP Pacitan dengan SSWP Ngadirejo sebesar 18.423.871,5. SSWP Pacitan dengan SSWP Bandar sebesar 4.884.764,3. SSWP Punung dengan SSWP Ngadirejo sebesar 4.068.926,6. SSWP Bandar dengan SSWP Ngadirejo sebesar 2.109.807,5. SSWP Punung dengan SSWP Bandar sebesar 1.666.798,4.

3. Sektor Basis

a) Kota Madiun

SSWP Taman memiliki sektor basis yaitu Perdagangan besar eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ sebesar 1,27. SSWP Kartoharjo memiliki sektor basis yaitu Informasi dan Komunikasi dengan nilai LQ sebesar 1,12. SSWP Manguharjo memiliki basis sektor yaitu Industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,48.

b) Kabupaten Madiun

SSWP Mejayan memiliki sektor basis yaitu Industri pengolahan dengan LQ sebesar 1,68. SSWP Jiwan memiliki sektor basis yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor dengan LQ 1,70. SSWP Dolopo memiliki sektor basis yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ 1,48. SSWP Wungu memiliki sektor basis yaitu Jasa Lainnya, yang paling terlihat adalah sektor pariwisatanya dengan LQ 1,54.

c) Kabupaten Ngawi

SSWP Karangjati memiliki sektor basis yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ sebesar 1,31. SSWP Ngawi memiliki sektor basis yaitu Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ sebesar 1,50. SSWP Widodaren memiliki sektor basis yaitu Jasa lainnya dan sektor yang paling menonjol adalah pariwisata dengan nilai LQ sebesar 1,34. SSWP Ngrambe memiliki sektor basis yaitu Industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,44.

d) Kabupaten Magetan

SSWP Magetan memiliki sektor basis yaitu Industri pengolahan dengan nilai LQ 1,48. SSWP Maospati memiliki sektor basis yaitu Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ sebesar 1,31. SSWP Plaosan memiliki sektor basis yaitu Jasa lainnya dan yang sektor yang paling menonjol adalah sektor pariwisata dengan nilai LQ sebesar 1,53. SSWP Kawedanan memiliki sektor basis yaitu sektor peternakan hewan seperti sapi dan ayam potong dengan nilai LQ sebesar 1,28. SSWP Parang juga memiliki sektor basis Perkebunan, yaitu kebun sayur dengan nilai LQ sebesar 1,30.

e) Kabupaten Ponorogo

SSWP Ponorogo memiliki sektor basis yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ sebesar 1,52. SSWP Jambon memiliki sektor basis yaitu Industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,53. SSWP Jetis memiliki sektor basis yaitu Jasa pendidikan dengan nilai LQ sebesar 1,32. SSWP Pulung memiliki sektor basis yaitu Jasa lainnya dan sektor yang paling menonjol adalah sektor pariwisata dengan nilai LQ sebesar 1,54. Slahung memiliki sektor basis yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ sebesar 1,51.

f) Kabupaten Pacitan

SSWP Pacitan memiliki sektor basis yaitu Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ 1,36. SSWP Bandar memiliki sektor basis yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ 1,14.

SSWP Ngadirojo memiliki sektor basis yaitu Jasa lainnya dan sektor yang paling besar adalah sektor pariwisata dengan nilai LQ sebesar 1,91. SSWP Punung memiliki sektor basis yaitu Industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,26.

Tabel 1 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan di Kota Madiun

ANALISIS	SSWP		
	Kartoharjo	Taman	Manguharjo
Skalogram	22	19	19
Indeks	846,69	748,65	604,66
Sentralitas			
Gravitasi	Interaksi terkuat dengan SSWP Taman	Interaksi terkuat dengan SSWP Kartoharjo	Interaksi terkuat dengan SSWP Taman
Location Quotient	Informasi dan Komunikasi	Perdagangan besar dan eceran: Reparasi mobil dan sepeda motor	Industri Pengolahan
HIRARKI	I	II	III

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 1 pusat pertumbuhan di Kota Madiun adalah SSWP Kartoharjo, SSWP Taman menjadi pusat pertumbuhan hirarki kedua dan SSWP Manguharjo menjadi pusat pertumbuhan hirarki ketiga di Kota Madiun.

Tabel 2 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Madiun

Analisis	SSWP			
	Mejayan	Dolopo	Jiwan	Wungu
Skalogram	19	18	16	14
Indeks	735,37	610,35	610,35	258,92
Sentralitas				
Gravitasi	Interaksi terkuat dengan SSWP Wungu	Interaksi terkuat dengan SSWP Wungu	Interaksi terkuat dengan SSWP Wungu	Interaksi terkuat dengan SSWP Jiwan
Location Quotient	Industri Pengolahan	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Perdagangan besar dan eceran: Reparasi mobil dan sepeda motor	Jasa Lainnya (pariwisata)
HIRARKI	I	II	III	IV

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 2 pusat pertumbuhan di Kabupaten Madiun adalah SSWP Mejayan, hirarki kedua adalah SSWP Dolopo, hirarki ketiga adalah SSWP Jiwan dan hirarki keempat adalah SSWP Wungu.

Tabel 3 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Ngawi

Analisis	SSWP			
	Ngawi	Widodaren	Ngrambe	Karangjati
Skalogram	20	16	17	16
Indeks	829,31	411,43	384,62	375,43
Sentralitas				

Gravitasi	Interaksi terkuat dengan SSWP Karangjati	Interaksi terkuat dengan SSWP Ngrambe	Interaksi terkuat dengan SSWP Widodaren	Interaksi terkuat dengan SSWP Ngawi
Location Quotient	Perdagangan besar dan eceran	Jasa Lainnya (Pariwisata)	Industri Pengolahan	Pertanian, kehutanan, dan perikanan
HIRARKI	I	II	III	IV

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 3 pusat pertumbuhan di Kabupaten Ngawi adalah SSWP Ngawi, hirarki kedua SSWP adalah Widodaren, hirarki ketiga adalah SSWP Ngrambe dan hirarki keempat adalah SSWP Karangjati.

Tabel 4 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Magetan

Analisis	SSWP				
	Maospati	Mageatan	Plaosan	Kawedanan	Parang
Skalogram	22	19	20	16	15
Indeks	750,90	611,66	424,69	239,96	166,12
Sentralitas					
Gravitasi	Interaksi terkuat dengan SSWP Kawedanan	Interaksi terkuat dengan SSWP Maospati	Interaksi terkuat dengan SSWP Magetan	Interaksi terkuat dengan SSWP Maospati	Interaksi terkuat dengan SSWP Magetan
Location Quotient	Perdagangan besar dan eceran	Industri Pengolahan	Jasa Lainnya (Pariwisata)	Peternakan	Perkebunan
HIRARKI	I	II	III	IV	V

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4 pusat pertumbuhan di Kabupaten Magetan adalah SSWP Maospati, hirarki kedua adalah SSWP Mageatan, hirarki ketiga adalah SSWP Plaosan, hirarki keempat adalah SSWP dan hirarki kelima adalah SSWP Parang.

Tabel 5 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo

Analisis	SSWP				
	Ponorogo	Jambon	Jetis	Pulung	Slahung
Skalogram	18	16	16	17	15
Indeks	701,08	412,93	334,18	325,42	232,93
Sentralitas					
Gravitasi	Interaksi terkuat dengan SSWP Pulung	Interaksi terkuat dengan SSWP Jetis	Interaksi terkuat dengan SSWP Ponorogo	Interaksi terkuat dengan SSWP Ponorogo	Interaksi terkuat dengan SSWP Jetis
Location Quotient	Perdagangan besar dan eceran	Industri Pengolahan	Jasa Pendidikan	Jasa Lainnya (Pariwisata)	Pertanian, kehutanan, dan perikanan
HIRARKI	I	II	III	IV	V

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 5 pusat pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo adalah SSWP Ponorogo, hirarki kedua adalah

SSWP Jambon, hirarki ketiga adalah SSWP Jetis, hirarki keempat adalah SSWP Pulung dan hirarki kelima SSWP Slahung.

Tabel 6 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Pacitan

Analisis	SSWP			
	Pacitan	Bandar	Ngadirejo	Punung
Skalogram	18	16	16	17
Indeks	711,53	412,71	397,72	378,04
Sentralitas				
Gravitasi	Interaksi terkuat dengan SSWP Punung	Interaksi terkuat dengan SSWP Pacitan	Interaksi terkuat dengan SSWP Pacitan	Interaksi terkuat dengan SSWP Pacitan
Location Quotient	Perdagangan besar dan eceran	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Jasa Lainnya (pariwisata)	Industri Pengolahan
HIRARKI	I	II	III	IV

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 6 pusat pertumbuhan di Kabupaten Pacitan adalah SSWP Pacitan, hirarki kedua adalah SSWP Bandar, hirarki ketiga adalah SSWP Ngadirejo dan hirarki keempat adalah SSWP Punung.

B. PEMBAHASAN

Pembangunan daerah secara tidak langsung merupakan rencana strategi untuk mencapai stabilitas ekonomi daerah. Menurut teori Perroux (*growth pole theory*), pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di seluruh daerah dan pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan kutub pertumbuhan dengan intensitas berbeda-beda. Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama pembangunan wilayah yang berlokasi di suatu daerah perkotaan yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah-daerah sekitarnya.

Pendekatan pengembangan wilayah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat dilaksanakan dengan mengacu kepada situasi, kondisi, potensi, dan hubungan, fungsional antar wilayah. Pelaksanaan pembangunan wilayah SWP Jawa Timur bagian barat, untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya, maka wilayah didorong agar mampu berkembang di atas kekuatannya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Penentuan kebijakan pembangunan, maka terlebih dahulu harus diketahui lokasi pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan. Pusat pertumbuhan dan pelayanan diharapkan mampu mempunyai peran dan fungsi untuk mendorong perkembangan wilayah belakangnya pula.

Tujuan penentuan pusat pertumbuhan adalah agar pemerataan pembangunan ekonomi dengan kota pusat

pertumbuhan sebagai sentral pertumbuhannya. Keuntungan adanya pusat pertumbuhan dalam sistem desentralisasi adalah untuk menyebarkan kegiatan ekonomi keseluruh wilayah dalam aspek pemerataan (Sjafrizal, 2008:58). Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas fasilitas-fasilitas pelayanan masih terakumulasi di daerah perkotaan seperti kecamatan ibukota kabupaten. Strategi pengembangan yang tepat dilakukan diharapkan pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya mengumpul di satu titik. Perhitungan dengan menggunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas menunjukkan kesamaan dengan teori, dimana pusat pertumbuhan yang mempunyai banyak fasilitas menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas kondisi fasilitas di SWP Jawa Timur bagian barat adalah baik. Ketersediaan sarana yang memadai namun konsentrasi fasilitas masih berada di daerah perkotaan. Wilayah yang memiliki kelengkapan fasilitas dan nilai indeks sentralitasnya yang tertinggi dapat ditetapkan sebagai lokasi pusat pertumbuhan. Terdapat 23 jenis fasilitas yang menjadi indikator analisis skalogram dan SSWP Kartoharjo memiliki kelengkapan fasilitas 22 jenis dan nilai indeks sentralitasnya 748,65 merupakan nilai kelengkapan fasilitas tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kota Madiun. SSWP Mejayan memiliki kelengkapan fasilitas 19 jenis dan nilai indeks sentralitasnya 734,37 merupakan nilai kelengkapan fasilitas tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Madiun. SSWP Ngawi memiliki kelengkapan fasilitas 20 jenis dan nilai indeks sentralitasnya 829,31 merupakan nilai kelengkapan fasilitas tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Ngawi. SSWP Maospati memiliki kelengkapan fasilitas 22 jenis dan nilai indeks sentralitasnya 750,90 merupakan nilai kelengkapan fasilitas tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Magetan. SSWP Ponorogo memiliki kelengkapan fasilitas 18 jenis dan nilai indeks sentralitasnya 701,08 merupakan nilai kelengkapan fasilitas tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo. SSWP Pacitan memiliki kelengkapan fasilitas 18 jenis dan nilai indeks sentralitasnya 711,53 merupakan nilai kelengkapan fasilitas tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Pacitan.

Pembahasan ini untuk mengetahui interaksi antar wilayah dalam SWP Jawa Timur bagian barat digunakan analisis gravitasi. Menurut Adisasmita (2006:26) keterkaitan antara pusat sebagai wilayah produksi atau pelayanan terhadap wilayah sekitar dapat diukur dari seberapa jauh jarak tempuh dari wilayah sekitar yang dituju.

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka digunakan analisis interaksi yang terjadi antara wilayah pengembangan dengan wilayah belakangnya di SWP Jawa Timur bagian barat secara umum keseluruhan sangat kuat. Hal ini menandakan bahwa kondisi sosial ekonomi antar wilayah besar kaitannya.

Hasil penelitian analisis gravitasi dengan menggunakan variabel jumlah penduduk dan jarak antar wilayah yang signifikan terhadap kuat lemahnya interaksi antar ruang di SWP Jawa Timur bagian barat. Hasilnya SSWP Kartoharjo sebagai pusat pertumbuhan dengan SSWP Taman sebagai daerah belakangnya menempati urutan pertama dalam kuatnya interaksi di Kota Madiun. SSWP Ngawi sebagai pusat pertumbuhan dengan SSWP Karangjati sebagai daerah belakangnya menempati urutan pertama dalam kuatnya interaksi antar ruang di Kabupaten Ngawi. SSWP Maospati sebagai pusat pertumbuhan dan SSWP Kawedanan sebagai daerah belakangnya menempati urutan pertama kuatnya interaksi antar ruang di Kabupaten Magetan. SSWP Ponorogo sebagai pusat pertumbuhan dengan SSWP Pulung sebagai daerah belakangnya menempati urutan pertama dalam kuatnya interaksi antar ruang di Kabupaten Ponorogo, serta SSWP Pacitan sebagai pusat pertumbuhan dengan SSWP Punung sebagai daerah belakangnya menempati urutan pertama dalam kuatnya interaksi antar ruang di Kabupaten Pacitan.

Daya tarik suatu wilayah juga dapat dilihat dari potensi wilayahnya. Potensi wilayah tersebut biasanya disebut sektor basis. Sektor basis adalah kegiatan ekonomi yang mendasarkan pandangan mengenai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan besarnya laju ekspor dari wilayah tersebut. Menurut Richardson (dalam Tarigan, 2006:47) teori basis ekonomi dalam pembangunan wilayah digunakan untuk mengetahui potensi atau peranan suatu sektordalam perekonomian wilayah. Sektor basis tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis *Location Quotient* (LQ). Ukurannya bahwa $LQ > 1$ menunjukkan sektor tersebut termasuk dalam sektor basis, sedangkan $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis.

Berdasarkan hasil analisis LQ dapat diketahui bahwa sektor basis di SWP Jawa Timur bagian barat berbeda-beda setiap wilayahnya. Beberapa SSWP memiliki sektor basis dengan $LQ > 1$ namun peneliti mengambil nilai LQ terbesar sebagai sektor basis setiap SSWP. Terdapat empat pusat pertumbuhan yang memiliki sektor basis Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor yaitu SSWP Ngawi, SSWP Maospati, SSWP Ponorogo dan SSWP Pacitan, sementara itu dua pusat pertumbuhan di Kota Madiun yaitu SSWP Kartoharjo basis sektornya adalah Informasi dan Komunikasi, pusat pertumbuhan di Kabupaten Madiun

yaitu SSWP Mejayan sektor basisnya adalah Industri pengolahan.

Kegiatan basis suatu wilayah mendasarkan pada permintaan dari lingkungan luar daerah. Teori basis ini sama dengan teori tempat sentral yang dikemukakan Christaller yang menekankan pada kegiatan jasa pemasaran. Menurut teori tersebut, pertumbuhan suatu wilayah pusat disebabkan karena adanya permintaan dari daerah belakangnya akan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh wilayah pusat. Wilayah pusat memiliki keterkaitan atau interkoneksi yang erat dengan daerah belakang dalam arus tenaga kerja, barang-barang dan jasa (Adisasmita, 2005:32). Keadaan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi potensi wilayah yang menunjukkan kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) berbeda-beda diantara SSWP satu dengan yang lain, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi yang didukung oleh sinergi kebijakan sektoral dengan kebijakan ekonomi basis terhadap sektor-sektor unggulan yang telah terintegrasi pada masing-masing wilayah.

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, kondisi fasilitas pelayanan di SWP Jawa Timur bagian barat telah memadai kebutuhan masyarakatnya. Fasilitas cenderung terkonsentrasi pada daerah perkotaan. Wilayah yang memiliki kelengkapan fasilitas dan nilai indek sentralitasnya yang tertinggi dapat ditetapkan sebagai lokasi pusat pertumbuhan.
2. Berdasarkan hasil analisis Gravitasi setiap wilayah memiliki bentuk dan kekuatan interaksi yang berbeda-beda. Hal tersebut pengaruhi oleh jumlah penduduk, jarak dan daya tarik masing-masing wilayah. Bentuk interaksi antar wilayah beragam seperti kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan lain-lain. SSWP sebagai pusat pertumbuhan memiliki kekuatan interaksi terbesar dengan daerah belakangnya.
3. Berdasarkan hasil analisis *Loction Quotient* (LQ) masing-masing sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif memberikan kontribusi cukup beragam pada wilayahnya masing-masing. Sektor yang menjadi sektor basis di SWP Jawa Timur bagian barat adalah sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan

Besar dan Eceran, Jasa Pariwisata dan Jasa Pendidikan.

4. Berdasarkan analisis lokasi pusat pertumbuhan, yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kota Madiun adalah SSWP Kartoharjo, pusat pertumbuhan di Kabupaten Madiun adalah SSWP Mejayan, pusat pertumbuhan di Kabupaten Ngawi adalah SSWP Ngawi, pusat pertumbuhan di SSWP Magetan adalah SSWP Maospati, pusat pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo adalah SSWP Ponorogo dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Pacitan adalah SSWP Pacitan.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan Pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota dapat lebih fokus dalam menentukan arah pengembangan wilayahnya sehingga pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan cepat dan tepat.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan dengan penyebaran sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan jumlah penduduk, distribusi spasial dan mobilitas penduduk serta jangkauan pelayanan dari setiap fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Danastri, Sasya. 2011. Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti Cirebon Selatan. *Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad, Dan Aswandi, H, 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, Vol 17, No.1, 2002*. Universitas
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi V. Jakarta: Bumi Aksara
- _____.2006. *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi*, Edisi Revisi III. Jakarta: Bumi Aksara